



**REVIU
RENCANA
STRATEGIS
TAHUN 2022**

SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI, PELAPORAN

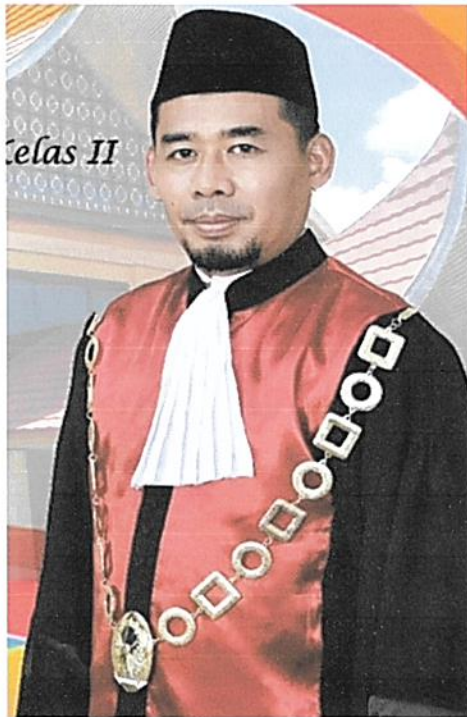
PENGADILAN NEGERI PAINAN KELAS II

Jl. Jenderal Sudirman Salido No. 158 Painan

Tlp/ Fax : (0756) 465215 / (0756) 465216 Email : painan_pn@yahoo.com

Website : www.pn-painan.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Pengadilan Negeri Painan dapat menyelesaikan pembuatan dokumen rencana strategis, yang dinamakan Renstra Pengadilan Negeri Painan Kelas II 2020-2024.

Renstra ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronkan dengan indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dengan target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari 2020-2024.

Rencana strategis disusun sesuai dengan hasil rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung RI

tahun 2011 dan jajaran peradilan di bawahnya dan sistem perencanaan pembangunan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan jangka panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Painan.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Painan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen rencana strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.

Pengadilan Negeri Painan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di daerah pesisir selatan.

Renstra ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Painan.

Semoga renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi pengadilan negeri painan yaitu mendukung terwujudnya pengadilan negeri painan yang agung.

Painan, 13 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Painan

The image shows the official seal of the Painan District Court, which is circular and contains the text 'PENGADILAN NEGERI PAINAN' around the perimeter. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19780215 200112 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I - PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.2 ANALISIS SWOT.....	3
1.3 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	11
BAB II - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	12
2.1 VISI.....	13
2.2 MISI.....	13
2.3 TUJUAN	13
2.4. SASARAN STRATEGIS	23
BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	24
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.....	24
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PN PAINAN.....	69
3.3 KERANGKA REGULASI.....	71
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN.....	75
BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	84
4.1 TARGET KINERJA.....	85
4.2 KERANGKA PENDANAAN.....	87
BAB V - PENUTUP	92
LAMPIRAN	
1 – S.K. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA.	
2 – REVIU MATRIX RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PAINAN TAHUN 2020-2024	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri painan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan.

Pengadilan Negeri painan merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Negeri painan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Rencana strategis adalah langkah awal yang dilakukan Pengadilan Negeri painan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan baik itu lokal, nasional, regional dan global yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan yang bersifat idealistik, sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri painan.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan.

Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri painan, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri painan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Pada awal tahun 2022 sampai saat ini, jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Negeri painan sebanyak 21 orang dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PENDIDIKAN
1	MUHAMAD FAUZAN HARYADI, S.H, M.H.	PEMBINA	KETUA	S2 HUKUM
	NIP. 19780215 200112 1 002	(IV/a)		
2	RIYA NOVITA, S.H., M.H.	PEMBINA TK.I	WAKIL KETUA	S2 HUKUM
	NIP. 19761107 200012 2 001	(IV/b)		
3	SYOFYAN ADI, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	HAKIM	S2 HUKUM
	NIP. 19880703 201712 1 002	(III/b)		
4	BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.	PENATA MUDA TK.I	HAKIM	S2 HUKUM
	NIP. 19920321 201712 2 004	(III/b)		
5	AKHNES IKA PRATIWI, S.H., M.Kn.	PENATA MUDA TK.I	HAKIM	S2 HUKUM
	NIP. 19930615 201712 2 002	(III/b)		
6	ADEK PUSPITA DEWI, S.H	PENATA MUDA	HAKIM	S1 HUKUM
	NIP. 19890923 201712 2 001	(III/a)		
7	BATINTA OKTAVIANUS P MELIALA, S.H	PENATA MUDA	HAKIM	S1 HUKUM
	NIP. 19941025 201712 1 003	(III/a)		
8	DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.	PENATA TK.I	PANITERA	S1 HUKUM
	NIP. 19811217 200912 1 003	(III/d)		
9	DESMINA SIMAMORA, S.H.	PENATA TK.I	SEKRETARIS	S1 HUKUM
	NIP. 19720120 199203 2 001	(III/d)		
10	HAVIZA. M, S.H.	PENATA TK.I	PANMUD	S1 HUKUM
	NIP. 19710313 199303 2 001	(III/d)	HUKUM	
11	BAITUL ARSYAH. M, S.H, M.H.	PENATA TK.I	PANMUD	S2 HUKUM
	NIP. 19740402 199303 1 001	(III/d)	PERDATA	
12	ARMEITA YANDA, S.E.	PENATA	KASUBBAG	S1 EKONOMI
	NIP. 19780519 200912 2 002	(III/c)	UMUM DAN KEU	
13	DIMAS MARESKA, S.H	PENATA	KASUBBAG	S1 HUKUM

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

	NIP. 19830310 200604 1 003	(III/c)	PTIP	
14	FADLIA. S, S.E.	PENATA	KASUBBAG	S1 EKONOMI
	NIP. 19850413 200904 2 006	(III/c)	KORTALA	
15	BENNY HAMDANI, S.H.	PENATA	ANALIS	S1 HUKUM
	NIP. 19870515 200604 1 002	(III/c)	HUMAS	
16	AR YULISMAN ERIKA, S.H	PENATA	PANITERA	S1 HUKUM
	NIP. 19851202 201212 1 001	(III/c)	PENGGANTI	
17	WINDA ARIFA, S.H.	PENATA	PANITERA	S1 HUKUM
	NIP. 19900815 201212 2 002	(III/c)	PENGGANTI	
18	ENDRY. T	PENATA MUDA TK.I	JURUSITA	SMA
	NIP. 19650727 199103 1 004	(III/b)		
19	BASYIRUNADZIR, S.Kom	PENATA MUDA	PRANATA KOMPUTER	S1 KOMPUTER
	NIP. 19941126 202012 1 007	(III/a)		
20	VERONIKA DWI K, A.Md	PENGATUR TK.I	BENDAHARA	DIII
	NIP.19891013 201503 2 003	(II/d)		KOMPUTER
21	APRILIANA RIZKI NUR LESTARI, A.Md	PENGATUR	ARSIPARIS	DIII
	NIP.19891013 201503 2 003	(II/c)		KEARSIPAN

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri painan dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan tantangan yang dihadapi.

A. ANALISIS FAKTOR INTERNAL

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri painan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

1. Merupakan unsur Muspiko dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah khususnya dengan wilayah hukum di kabupaten Pesisir Selatan
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri painan selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Adanya sistem pelayanan terpadu satu pintu yang memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi
4. Tersedianya ruang command center
5. Telah adanya sistem manajemen penelusuran perkara berbasis teknologi informasi
6. Telah adanya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum pengadilan negeri painan

2. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri painan dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri painan belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat.
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri painan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri painan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Painan.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja harian.
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa SIPP Versi 4.1.1 dan Monitoring Implementasi SIPP Versi 1.3, pelaksanaannya sudah mulai maksimal.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengakibatkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan.

B. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

a) Peluang (Opportunities)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri painan untuk melakukan reformasi/ perbaikan dapat ditinjau dengan beberapa aspek, sebagai berikut:

Aspek Proses Peradilan

- Memaksimalkan media website Pengadilan Negeri painan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Disamping itu Pengadilan Negeri painan terus mengembangkan internet guna meningkatkan pelayanan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya kenaikan tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan tinggi padang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal dan pembinaan serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan dari Pimpinan Pengadilan Negeri painan.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan tinggi padang.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Negeri painan.
- Telah memiliki Standar Operasional Prosedur

Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Negeri painan berupa internet dan website.

b) Tantangan yang dihadapi (Threats)

Tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri painan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan jalan keluarnya (solusinya) untuk dapat dilakukan reformasi/perbaikan sebagaimana yang diharapkan, adalah sebagai berikut:

Aspek Proses Peradilan

- Belum memiliki tolak ukur dan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri painan.

Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pegawai Pengadilan Negeri painan belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri painan.
- Pegawai Pengadilan Negeri painan belum seluruhnya bisa menguasai teknologi informasi.

Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sedang dipersiapkan Sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Negeri Painan membutuhkan waktu lebih lama.
- Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>1. Merupakan unsur forkompinda dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah khususnya dengan wilayah hukum di kabupaten pesisir selatan</p> <p>2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri painan selaku Pengadilan Tingkat Pertama</p>	<p>◇ Aspek Proses Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat. Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan masyarakat para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri painan. <p>◇ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Negeri painan belum mempunyai kewenangan untuk merekrut 	<p>◇ Aspek Proses Peradilan</p> <p>1. Adanya website Pengadilan Negeri painan yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.</p> <p>◇ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Padang maupun Mahkamah Agung untuk 	<p>◇ Aspek Proses Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya suatu media yang dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa pengadilan, sehingga kita belum dapat mengetahui sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan kepada mereka. <p>◇ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> Personil di Pengadilan Negeri painan belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Painan,

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

	<p>pegawai sendiri sesuai kebutuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen PNS yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri <p>Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <p>Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT Padang secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri</p> <p>Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <p>Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa CTS Versi 4.1.1, dan pelaksanaannya sudah mulai maksimal</p>	<p>meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p> <p>◊Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <p>Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh PT Padang secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri</p> <p>Painan</p> <p>◊ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa CTS Versi 4.1.1, dan pelaksanaannya sudah mulai maksimal 	<p>sehingga dikhawatirkan tujuan yang kita harapkan tidak dapat tercapai.</p> <p>◊ Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya sistem <i>reward & punishment</i> untuk mengontrol kinerja aparat peradilan. <p>◊ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pegawai yang terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga penyelesaian administrasi untuk perkara Pengadilan Negeri painan membutuhkan waktu lebih lama.
--	--	--	---

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

	<p>• Sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi yang dipakai saat ini berupa CTS Versi 4.1.1, dan pelaksanaannya sudah mulai maksimal.</p> <p>Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri painan yang mengakibatkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah ditetapkan. 	<p>Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. <p>◊ Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Painan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum dapat memenuhi harapan sehingga anggaran yang diterima tersebut dapat menjadi masalah baru dan dapat menjadi hambatan dalam upaya meningkatkan kinerja.
--	--	--	--

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

		<ul style="list-style-type: none">• Sarana gedung Pengadilan Negeri painan yang dibangun pada tahun 1974 baru mengalami perbaikan / renovasi pada gedung di tahun 1995, masih banyak yang harus diperbaiki dan dikhawatirkan bila tidak segera dibangun kembali akan menimbulkan masalah besar. Disamping itu pula, volume ruangan sangat terbatas terutama kebutuhan Ruang Arsip, sehingga akan lebih optimal jika gedung Pengadilan Negeri painan ini dihapuskan dan dibangun ulang.
--	--	--

1.3. FAKTOR KEBERHASILAN

Dengan melihat faktor tersebut, pengadilan negeri painan kelas II akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju pengadilan negeri painan yang agung sebagaimana dirumuskan dalam visi pengadilan negeri painan.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas faktor kunci keberhasilan adalah:

- a. peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pengadilan negeri painan
- b. peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif
- c. peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan pengadilan negeri painan
- d. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pengadilan negeri painan

selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- a. adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
- b. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada pengadilan negeri painan agar menjadi profesional.
- c. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan kebijakan pada masing-masing fungsi yang ada di Pengadilan Negeri Painan, diperlukan dalam suatu dokumen Rencana Strategis.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri painan tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi, Potensi dan Permasalahan, dan Strategi yang akan dilaksanakan dalam periode waktu 2020-2024.

2.1. VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri painan Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri painan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri painan.

Untuk periode 2020-2024, Pengadilan Negeri painan masih menggunakan Visi periode sebelumnya karena diharapkan Visi ini masih dapat memberikan arah yang akan ditempuh oleh Pengadilan Negeri painan dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Adapun Visi Pengadilan Negeri painan adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI painan YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri painan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri painan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di pengadilan negeri painan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri painan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Painan

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun.

Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi pengadilan negeri painan.

Tujuan yang hendak dicapai oleh pengadilan negeri painan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator jasa konsultan pos bantuan hukum dan layanan pembebasan biaya perkara.

4. Terwujudnya kepatuhan masyarakat akan keputusan pengadilan.

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: persentase perkara perdata yang ditindaklanjuti.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai pengadilan negeri painan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali
- Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi
- Index kepuasan responden yang puas terhadap layanan pengadilan negeri painan

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
 - Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
 - Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, pengadilan negeri painan menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Program : dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung
Kegiatan : pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi
Indikator kegiatan : layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:
 - Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali
 - Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung ini menjadi rencana kerja dan anggaran (rka k/l) dengan dana dari dipa badan urusan administrasi (bua) mahkamah agung ri (dipa 01)

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Pada tahun 2021 pengadilan negeri painan mendapat pagu sebesar Rp.3.492.544.000, -

2. Program : peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung RI

Kegiatan : peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung RI

Indikator kegiatan : layanan sarana dan prasarana internal

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index kepuasan responden yang puas terhadap layanan pengadilan negeri painan
- Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada pihak tepat waktu
- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung ini menjadi rencana kerja dan anggaran (rka k/l) dengan dana dari dipa badan urusan administrasi (bua) mahkamah agung ri (dipa 01)

Pada tahun 2021 pengadilan negeri painan mendapat pagu sebesar Rp.37.500.000, -

3. Program : peningkatan manajemen peradilan umum

Kegiatan : peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator kegiatan : perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu dan dukungan penyelesaian perkara di pengadilan

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
- Persentase putusan perkara yang ditindak lanjuti (eksekusi)

Program peningkatan manajemen peradilan umum ini menjadi rencana kerja dan anggaran (rka k/l) dengan dana dipa badan peradilan umum mahkamah agung ri (dipa 03)

Pada tahun 2021 pengadilan negeri painan mendapat pagu sebesar rp.104.928.000, -

Nomor	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	10
4		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
5		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	81
6		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	91
7		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100
8		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0
9		Index Kepuasan Pencari Keadilan	81
10	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
11		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
12		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	0
13		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	100
14		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100
15	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	0
16		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
17		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
18	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri PAINAN

FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PAINAN

VISI									
"Terwujudnya pengadilan negeri painan yang agung"									
Misi Pengadilan Negeri painan adalah sebagai berikut:									
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri painan.									
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di pengadilan negeri painan.									
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri painan.									
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Painan									
TUJUAN 1		TUJUAN 2		TUJUAN 3		TUJUAN 4			
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi		Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan		Terwujudnya keputusan masyarakat akan keputusan pengadilan			
SASARAN STRATEGIS 1		SASARAN STRATEGIS 2		SASARAN STRATEGIS 3		SASARAN STRATEGIS 4			
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel									
Sasaran 1 indikator 1	Sasaran 1 indikator 2	Sasaran 1 indikator 3	Sasaran 1 indikator 4	Sasaran 1 indikator 5	Sasaran 2 indikator 1	Sasaran 2 indikator 2	Sasaran 2 indikator 3	Sasaran 2 indikator 4	Sasaran 3 indikator 1
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali	Persentase perkara yang diselesaikan dengan diversi	Index kepuasan responden yang puas terhadap layanan pengadilan negeri painan	Persentase putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, peninjauan kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	Sasaran 3 indikator 1
Program 1 : Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung		Program 2 : Program peningkatan sarana dan prasarana aparat mahkamah agung RI		Program 3 : Program peningkatan manajemen peradilan umum		Program 3 : Program peningkatan manajemen peradilan umum		Sasaran 3 indikator 2	
Kegiatan 1 : pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi		Kegiatan 2 : Pengadaan layanan sarana dan prasarana internal		Kegiatan 3 : Indikator kegiatan 2 :		Kegiatan 3 : Indikator kegiatan 3 :		Sasaran 3 indikator 3	
Indikator kegiatan 1 : layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran								Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (eksekusi)	

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri painan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan (kemandirian individual/fungsional).

Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik.

Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan.

Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri painan harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan.

Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri painan, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil

Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri painan

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri painan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan.

Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan Pengadilan Negeri painan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non teknis, secara operasional, Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Negeri painan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut Pengadilan Negeri painan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri painan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri painan.

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri painan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Negeri painan.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Negeri painan itu sendiri.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Pengadilan Negeri painan turut serta melaksanakan kebijakan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan penguatan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

pengawasan terhadap aparatur dengan cara dan upaya pencegahan korupsi antara lain:

1. Melaksanakan paket kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI atas Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
2. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
3. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya
4. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. Pembinaan langsung dari Pimpinan Pengadilan Tinggi Padang kepada Pengadilan Negeri painan.
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri painan.
7. Melaksanakan asistensi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri painan
8. Melaksanakan pengisian E-LHKPN dalam rangka tertib pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara setiap tahun secara rutin.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri painan yang agung”.

Pengadilan Negeri painan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan *e-Court*
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah agung.

Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah agung secara berkala.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. *small claim court* ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.

Dengan *small claim court* akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.

Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court* maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan adanya penyelesaian perkara melalui *small claim court*, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal.

Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah.

Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana.

Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditingkatkan menjadi 500.000.000.

Mahkamah agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2) Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi.

Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan.

Pusdiklat Mahkamah agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing.

Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3) Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia.

Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

mencapai Mahkamah agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama.

Tumpukan perkara di Mahkamah agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat.

Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. Dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding.

Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah.

Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi.

Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*).

Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah agung.

Pada tahun 2018 Mahkamah agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-Court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan.

Dengan aplikasi *e Court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.

Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4) Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum.

Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum.

Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5) Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara.

Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya.

Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu.

Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua.

Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali.

Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

Disamping menjadi kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6) Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7) Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat.

Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi.

Penegakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat.

Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku.

Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.

Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya.

Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan.

Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban.

Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.

Munculnya sebuah ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.

Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana.

Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara.

Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara.

Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang.

Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversifikasi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban.

Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara.

Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut.

Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan *restorative justice*, Mahkamah agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi *restorative justice* ini dapat berjalan dengan optimal.

Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas *restorative justice* dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Reformulasi asas *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban.

Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal.

Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum.

Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban.

Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8) Hak Uji Materil

Istilah *Judicial Review* di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Peraturan perUndang Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi.

(Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan *judicial review* pada Mahkamah agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.

b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.

b. Termohon adalan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

a. Nama dan alamat pemohon;

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau

2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah agung dengan cara langsung ke Mahkamah agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.

2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

a. Panitera Mahkamah agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;

b. Panitera Mahkamah agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;

c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

b. Dalam hal Mahkamah agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.

c. Dalam hal Mahkamah agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.

b. Putusan Mahkamah agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil.

Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:

✓ Lex spesialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.

✓ Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

✓ Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM. Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9) Penguatan lembaga eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (*non executable*).

Dalam praktiknya, proses eksekusi seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami *conflict of interest* karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ Faktor Internal

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim.

Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusnya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi.

Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.

2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan.

Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi.

Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan.

Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ Faktor Eksternal:

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.

2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan.

Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh disandarkan pada kehendak sukarela pihak pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan.

Dengan aplikasi e Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan tanpa dikarenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini.

Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

Hal ini tergambar dengan setidaknya tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik.

Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.
Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapkan Mahkamah agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah.

Karena itu, untuk sementara aplikasi ini akan diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Diharapkan pada tahun 2020 seluruh pengadilan di Indonesia sudah menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata.

Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini.

Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik.

Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan.

Disamping itu Mahkamah agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Agama, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11) SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat.

Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut.

Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT.

Hal ini terlihat dalam RJPMN 2015- 2019, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Saat ini SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan.

Pada tahun 2020 direncanakan SPPT pada lingkungan Mahkamah agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan dengan 22 data yang dapat di

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

pertukaran meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba.

Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan.

Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting.

Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya.

Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan.

Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan.

Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*).

Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal.

Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah agung.

Kebijakan penganggaran Mahkamah agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024.

Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah agung, maka diambil suatu kebijakan untuk mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding.

Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha.

Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri.

Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; **Anak yang menjadi korban** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; **Anak yang menjadi saksi** adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak.

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.

13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas.

Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus diperkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan.

Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah.

Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional peneliti merupakan hal yang sangat penting.

Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya.

Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang.

Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut.

Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan.

Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial.

Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional.

Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri.

Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku.

Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:

- o Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- o Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- o Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- o Remunerasi berbasis kompetensi;
- o Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian.

Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir.

Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:

- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah agung".

Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah agung melonjak drastis.

Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparat Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen -- sampai batas tertentu--

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia.

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pebgawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilkitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan.

Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY).

Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.
3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Mahkamah agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

15) Peningkatan tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Mahkamah agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.

Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "*interoperability*" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Pengembangan TI di Mahkamah agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal- hal berikut ini:

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

Undang Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perUndang-Undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah agung Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System (CTS)*).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti:

- 1) Sistem rekrutmen di Mahkamah agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan,
- 2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat,
- 3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong,
- 4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi,
- 5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik,
- 6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan
- 7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah

- 1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*),
- 2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah agung, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah agung,
- 3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- 4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah agung.

Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama.

Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu

- (1) Penyusunan Rancangan

Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran

- (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE- 6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran *Corona Virus Disease* atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi *e-Court* untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*.

Aplikasi *e-Court* merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau *e-court* agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi *e court* pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19.

Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah agung mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (*e-learning*) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis *e-learning* digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan *in class training* dengan *e-learning* yang kita kenal dengan nama *blended learning*.

Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis *e-learning*.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis *e-learning*, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah agung mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi.

Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah agung menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis *e-learning*, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030.

Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan.

Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal.

Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui *Zoom Meeting* sebagai media untuk berbagai keperluan.

Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka.

Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar.

Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah agung sangat luas.

Koordinasi antara Mahkamah agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi *zoom meeting* ini maka Mahkamah agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan.

Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PAINAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri painan menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung.

Dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan.
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan serta menetapkan faktor - faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan misi, maka dapat ditentukan strategi operasional.

Strategi tersebut ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan dengan perencanaan kebijakan dan program yang akan dipergunakan sebagai pedoman operasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri painan menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui dua program yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen pengadilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kegiatan biaya ATK Perkara, pengiriman berkas ke

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Pengadilan Tingkat Banding dan MA yang lengkap dan tepat waktu, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelesaian perkara melalui:

- 1) Persentase sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan.
- 2) Persentase perkara masuk yang diselesaikan.
- 3) Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata,
- 4) Persentase perkara yang selesai dalam jangka waktu lebih 3 (tiga) bulan untuk Perkara Pidana dan Perkara Perdata.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui dua program yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk Belanja Pegawai dengan indikator kinerja kegiatan Pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor, layanan dukungan manajemen pengadilan melalui pengawasan dan sosialisasi.
- b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk tersedianya operasional persidangan dengan indikator kegiatan biaya ATK Perkara, pengiriman berkas ke Pengadilan Tingkat Banding dan MA yang lengkap dan tepat waktu, pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah sebagai berikut:

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- 2) Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

3.Peningkatan kualitas pengawasan

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan penyelesaian perkara melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk pembinaan dan pemeriksaan (pengawasan dan monitoring penyelesaian perkara).

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan dengan indikator sasaran persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

4.Peningkatan kualitas Sumber Daya Masyarakat

Program yang digunakan dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum melalui DIPA 03 Badan Peradilan Umum untuk pertemuan/jamuan makan/delegasi untuk rapat bulanan, pembinaan dan sosialisasi kebijakan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- 2) Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial
- 3) Persentase pejabat yang lulus mengikuti *fit and proper test* dalam rangka promosi jabatan.

3.3 KERANGKA REGULASI

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja Pengadilan Negeri painan, pola pikir serta budaya kerja para pegawai Pengadilan Negeri painan didalamnya akan menjadi lebih baik.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Target dari program ini bertujuan untuk menciptakan komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, agar terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang baik serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi:

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi Mahkamah Agung yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang akan di laksanakan oleh seluruh tingkat Peradilan serta pada Pengadilan Negeri painan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul, contohnya pada penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri painan yang masih sering mengalami keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan efesiensi organisasi Pengadilan Negeri painan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Penataan Tata Laksana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Pengadilan Negeri painan.

Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintahan, adanya efesiensi proses manajemen pemerintahan dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi.

Program ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan.

Program ini dapat dilaksanakan kegiatan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja terutama pada SDM Pengadilan Negeri painan.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program penguatan Akuntabilitas Kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja akuntabilitas pemerintah.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

7. Penguatan Pengawasan

Dengan adanya program Penguatan Pengawasan ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada seluruh instansi pemerintah.

Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing instansi.

Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintahan.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

MATRIK KERANGKA REGULASI

NO	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Kebutuhan Regulasi	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim dan Panitera
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	SOP Penyelesaian Perkara	Majelis Hakim Dan Panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	SOP Penyelesaian Perkara	Ketua, Wakil Ketua dan Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Meningkatkannya kepastian hukum	SOP Penyelesaian Perkara	Panitera

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

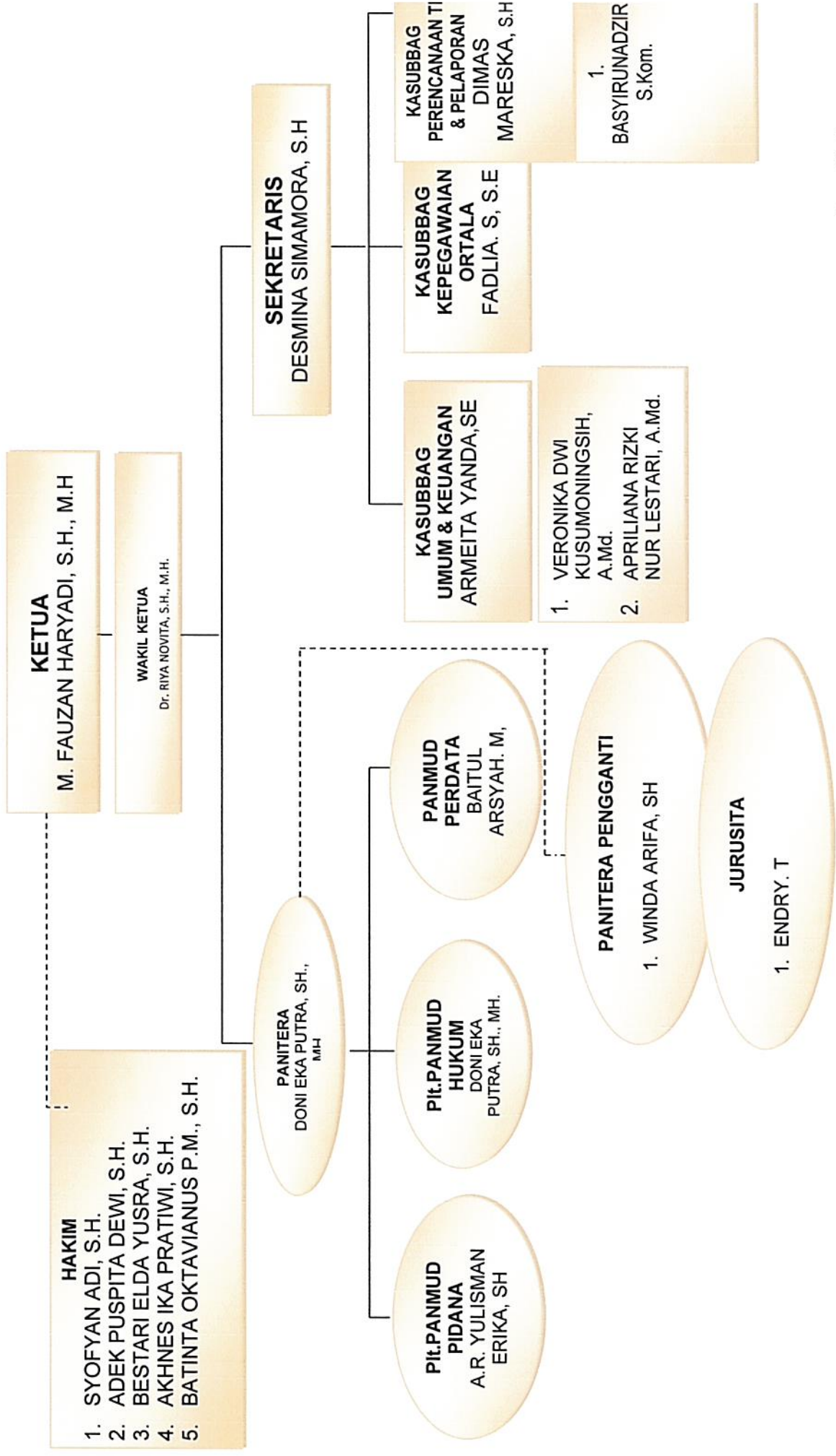
Struktur organisasi Pengadilan Negeri painan telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan.

Sebagaimana tercantum dalam Perma tersebut, suatu Pengadilan dipimpin oleh Ketua Pengadilan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan.

Guna tertib dan lancarnya pelaksanaan administrasi di Pengadilan, maka ditunjuklah seorang Panitera yang menangani administrasi perkara dan dan seorang Sekretaris yang menangani administrasi umum disuatu Pengadilan.

Lebih lanjut mengenai struktur organisasi Pengadilan Negeri painan dapat dilihat dalam bagan berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PAINAN



Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

Daftar Nama Pejabat Struktural Pengadilan Negeri painan

No	N a m a	J a b a t a n
1.	MUHAMAD FAUZAN HARYADI SH., MH.	<i>Ketua</i>
2.	DR. RIYA NOVITA, SH., MH.	<i>Wakil Ketua</i>
3.	DONI EKA PUTRA, SH., MH.	<i>Panitera</i>
4.	DESMINA SIMAMORA, SH.	<i>Sekretaris</i>
5.	A.R. YULISMAN ERIKA, SH.	<i>Plt. Panitera Muda Pidana</i>
6.	BAITUL ARSYAH M., SH., MH.	<i>Panitera Muda Perdata</i>
7.	DONI EKA PUTRA, SH., MH.	<i>Plt. Panitera Muda Hukum</i>
8.	ARMEITA YANDA, SE.	<i>Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan</i>
9.	DIMAS MARESKA, SH	<i>Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan</i>
10.	FADLIA S., SE.	<i>Kepala Sub Bagian Ortala & Kepegawaian</i>

➤ KEDUDUKAN

Pengadilan Negeri painan sebagai lembaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

➤ TUGAS POKOK

Tugas pokok Pengadilan Negeri painan sesuai dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus/ menyelesaikan perkara pidana dan perdata.

> FUNGSI

Selain tugas pokok sebagai tersebut di atas, Pengadilan Negeri Painan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama (*vide*: Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (*vide*: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 jo KMA No. KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara, administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- d. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Penerapan Hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. (*vide*: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- e. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum/perlengkapan) (*vide*: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).
- f. Fungsi lainnya, yakni Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Uraian tugas dan fungsi Pengadilan Negeri painan sesuai struktur organisasi Pengadilan Negeri painan adalah sebagai berikut:

- **Ketua** sebagai kawal depan (*voorpost*) Makamah Agung, yaitu dalam hal:
1. melakukan pengawasan terhadap
 - a) penyelenggaraan peradilan,
 - b) para Hakim dan pejabat Kepaniteraan,
 - c) masalah-masalah hukum yang timbul,
 - d) masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan,
 - e) masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung,
 2. menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Pengadilan Tinggi,
 3. meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan,
 4. membina dan memberikan petunjuk, tegoran atau peringatan bila dipandang perlu,

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

5. menetapkan suatu perkara,
 6. membagi perkara kepada Hakim,
 7. memberi izin untuk melaksanakan putusan,
 8. mengevaluasi laporan penanganan perkara yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya
 9. mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Pengadilan Tinggi dan
 10. membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya.
- **Wakil Ketua** mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri Painan membawahi:

- **Majelis Hakim** mempunyai tugas:
1. menetapkan hari sidang,
 2. memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya, maka Hakim bertanggung jawab atas
 3. pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
 4. menandatangani,
 5. mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
 6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan,
 7. melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan adanya tugas sebagai
 8. Hakim Pengawas Bidang dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara / Kepaniteraan (Perdata, Pidana dan Hukum) dan administrasi Kesekretariatan (Keuangan, Kepegawaian, dan Umum).
- **Panitera** mempunyai tugas
1. membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan,
 2. bertanggung jawab atas pengurusan
 - a) berkas perkara,

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

- b) putusan,
 - c) dokumen,
 - d) buku daftar/register,
 - e) biaya perkara, dan
 - f) surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,
3. menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi kesekretariatan,
4. mengatur tugas
- a) Panitera Muda,
 - b) Panitera Pengganti,
 - c) Juru Sita,
 - d) Juru Sita Pengganti.

Panitera membawahi:

- Panitera Muda Perdata mempunyai tugas

- 1. membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan,
- 2. melaksanakan administrasi perkara,
- 3. mempersiapkan persidangan,
- 4. menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perdata,
- 5. memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,
- 6. mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya,
- 7. menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi,
- 8. menyiapkan berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung.

- Panitera Muda Pidana mempunyai tugas

- 1. membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan,
- 2. melaksanakan administrasi perkara,
- 3. mempersiapkan persidangan,
- 4. menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,
- 5. memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan
- 6. mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

7. menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Pidana.

- **Panitera Muda Hukum** mempunyai tugas

1. mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data,
2. menyajikan statistik perkara,
3. menyusun laporan perkara,
4. menyimpan arsip berkas perkara (Perdata dan Pidana), dan
5. tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
6. mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

➤ **Sekretaris** mempunyai tugas

1. melaksanakan sebagian tugas Ketua dalam pengurusan surat-surat,
2. penyusunan arsip dan
3. pembinaan administrasi Kepegawaian, Umum dan Keuangan, Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan di Pengadilan Negeri painan.

Sekretaris membawahi

- **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana** mempunyai tugas

1. melaksanakan sebagian tugas dalam mengelola dan membina administrasi Kepegawaian di Pengadilan Negeri painan,
2. mengkoordinasi urusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai,
3. menyusun DUK, Bezzeting pegawai,
4. mengupload SIMPEG,
5. mencatat absensi pegawai, dan
6. urusan kepegawaian lainnya.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas

1. melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Pembinaan Keuangan di lingkungan Pengadilan Negeri Painan (kecuali keuangan perkara) serta
2. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

3. mempunyai tugas membina dan melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan** mempunyai tugas

1. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, anggaran dan
2. Pengelolaan Teknologi Informasi beserta
3. pelaporan.

➤ **Panitera Pengganti** mempunyai tugas

1. membantu Hakim dengan
 - a) mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan
2. bertugas membantu Hakim dalam hal:
 - a) membuat penetapan hari sidang,
 - b) membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,
 - c) dikeluarkan dari tahanan atau
 - d) dirubah jenis penahanannya,
3. mengetik putusan Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan
4. menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Perdata bila telah selesai dimutasi.

➤ **Juru Sita** mempunyai tugas

1. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua, Hakim dan Panitera, dalam hal tugas
2. menyampaikan masalah perkara yang sedang disidangkan.

➤ **Juru Sita Pengganti** mempunyai tugas

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Panitera, Panitera Pengganti dan Juru Sita dalam hal
2. pelaksanaan panggilan sidang bagi pihak yang berperkara, baik di dalam wilayah hukum painan maupun
3. bantuan delegasi ke Pengadilan Negeri lainnya,
4. menjalankan pemberitahuan isi putusan banding/kasasi/peninjauan kembali ke pihak yang berperkara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri painan tahun 2021 merupakan pencapaian atas target kinerja dari Renstra Pengadilan Negeri painan tahun 2020-2024.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri painan tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selama tahun 2021 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri painan sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Negeri painan juga berupaya meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Secara bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan.

Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri painan sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang dikenal dengan nama Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS) dan Monitoring Implementasi SIPP.

Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

TARGET KINERJA PENGADILAN NEGERI PAINAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target					Kerangka pendanaan
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a.1. Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	Program 1 : Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung Kegiatan 1 : pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi Indikator kegiatan 1 : layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran
			a.2. Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	
			b.1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	10	10	10	10	10	
			b.2. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	
			c.1. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	83	84	
			c.2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	91	92	93	94	
			c.3. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100	
			d. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0	0	0	0	0	
			e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80	81	82	83	84	
			2.	Terwujudnya penyederhanaan proses	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PAINAN

Instansi : Pengadilan Negeri Painan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Painan yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
			100		Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

yang pasti, transparan dan akuntabel.	10		10	Persentase Perdata Diselesaikan Waktu	10	10	10	10	10				
				Persentase perkara pidana diselesaikan waktu	100	100	100	100					
				Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Banding	80	81	82	83	84				
				Persentase Perkaranya Tidak Mengajukan Hukum Kasasi	90	91	92	93	94				
				Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Peninjauan Kembali	100	100	100	100	100				
					100		100						

**BAB 5
PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri painan tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri painan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan.

Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri painan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Painan dapat terwujud dengan baik.

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PAINAN

- Instansi : Pengadilan Negeri Painan
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Painan yang Agung
 Misi :
 5. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
 6. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 7. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
 8. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target					Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target	Rp.	
				Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024						
1	9.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3	100	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya mahkamah agung	pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi	layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran	1.0 layanan	Rp.3.492.544.000,-	
		4	100		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100						
		5	10		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	10	10	10	10	10						
		6	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100						
		7	82		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	81	82	83	84						
		8	92		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90	91	92	93	94						
		9	100		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	100	100	100	100	100						

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

10.	Tenwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Tehnologi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	0	0	0	0	0	0	84	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur mahkamah agung RI	pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan mahkamah agung RI	Pengadaan layanan sarana dan prasarana internal	1.0 layanan	Rp.37.500.000,-

Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Pengadilan Negeri painan

11.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo	0	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Perakara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Program peningkatan manajemen peradilan umum	peningkatan manajemen peradilan umum	Layanan posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	rp.104.928.000,-
12.	Terwujudnya pelayanan	Persentase putusan perkara/perdata yang ditindaklanjuti	10	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Perakara yang Putusan Perakara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Program peningkatan manajemen peradilan umum	peningkatan manajemen peradilan umum	Layanan posbakum dan perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	rp.104.928.000,-



KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI PAINAN

(Signature)

MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH., MH.
NIP. 19780215 200112 1 002

(Signature)

DONI EKA PUTRA, SH., MH.
NIP. 19811217 200912 1 003



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIPAINAN
NOMOR : W3.U9/02/KPN/SK/I/2022
TENTANG

TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN NEGERI PAINAN

KETUA PENGADILAN NEGERIPAINAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka telah dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Painan No. W3.U9/ /KPN/SK/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021;
- b. Bahwa berhubung telah dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri PAINAN maka perlu dilakukan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan;
- c. Bahwa dalam rangka penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri PAINAN, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan;
- d. bahwa dengan pertimbangan point a, b, dan c tersebut diatas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan, dengan susunan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2020-2024 PENGADILAN NEGERI PAINAN;
- Pertama : Tim Penyusunan Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri PAINAN sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini bertugas untuk menyusun Reviu Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Painan;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 10 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH. M.H.
NIP. 19780215 200112 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIPAINAN

Nomor : W3.U9/02/KPN/SK/I/2022

Tanggal : 10 Januari 2022

Tentang : Tim Penyusun Reviu Renstra 2020-2024
Pengadilan Negeri Painan

TIM PENYUSUNAN REVIU RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN NEGERIPAINAN

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1.	MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH. M.H	Ketua	Pelindung
2.	DR. RIYA NOVITA, SH. MH	Wakil	Pengarah
3.	DONI EKA PUTRA, SH. MH	Panitera	Ketua
4.	DESMINA SIMAMORA, SH	Sekretaris	Sekretaris
5.	A.R. YULISMAN ERIKA, SH	Plt. Panmud Pidana	Anggota
6.	BAITUL ARSYAH, SH. MH	Panmud Perdata	Anggota
7.	FADLIA S, SE.	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala	Anggota
8.	DIMAS MARESKA, SH	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
9.	ARMEITA YANDA, SE.	Kasubbag.Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di PAINAN
Pada Tanggal 10 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI PAINAN



MUHAMAD FAUZAN HARYADI, SH. M.H
NIP. 19780215 200112 1 002